

Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Maluku Tenggara

Technical Guidance for Quality Governance of Tourism in Southwest Mollucca

Santi Palupi¹, Ridwan M.O. Belu²

¹Program Studi Bisnis Perhotelan

¹Universitas Agung Podomoro, ²Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

¹APL Tower Lt. 5, Jl. Let.Jen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, Indonesia

²Gedung Sapta Pesona, Jln. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat 10110, Indonesia

santi.palupi@podomorouniversity.ac.id; ridwanbelu@gmail.com

correspondence: santi.palupi@podomorouniversity.ac.id

Received: 03/07/2023	Revised: 28/10/2023	Accepted: 14/11/2023
----------------------	---------------------	----------------------

DOI: <https://doi.org/10.25170/mitra.v7i2.4514>

Citation: Palupi, S. & Belu, R.M.O.(2023). Title. MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(2), 222-231. <https://doi.org/10.25170/mitra.v7i2.4514>

ABSTRACT

Indonesian tourism is a leading economic sector that is experiencing rapid growth and is the main driving force for the country's foreign exchange earnings, encouraging business development, infrastructure development and employment. The aim of this community service is to increase the capacity and competence of the community or human resources for Tourism Destination Managers, especially village communities in the buffer area of Southeast Maluku to manage and develop potential tourist attractions in tourist villages. Observational methods with field technical guidance were used to achieve this goal. This PKM was held in collaboration between the Ministry of Tourism and Creative Economy and the Southeast Maluku Regency Tourism Office. The PKM implementation time is March 16 and 17 2023. PKM activities are carried out in stages including three activities, namely determining the location, selecting participants and implementing the activity. The results of technical guidance for five representatives of five selected tourist villages (Letvuan Tourism Village; Wab Tourism Village, Ohoidertawun Tourism Village; Soinrat Tourism Village, and Tanimbar Kei tourism village) show that the villages have potential tourist attractions that must be managed well to support development of tourist villages. The community is aware of the need to increase awareness of tourism village managers regarding the important role of the tourism sector in improving the economy of village communities. The implication of this Technical Guidance is the need for tourist villages to reorganize the management of tourist attractions in the form of tourism packages that are able to optimize existing potentials at the location and build networks and collaboration with tourism business actors.

Keywords: technical guidance; tourist village; village development; tourist; governance

ABSTRAK

Pariwisata Indonesia merupakan sektor ekonomi unggulan yang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi motor penggerak utama penerimaan devisa negara, mendorong perkembangan usaha, membangun infrastruktur, dan menyerap tenaga kerja. Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi pariwisata. Metode observasional dengan bimbingan teknis lapangan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. PkM ini terselenggara atas kerja sama antara Kemenparekraf dan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu pelaksanaan tanggal 16 dan 17 Maret 2023. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan penentuan lokasi, pemilihan peserta, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil bimbingan teknis terhadap lima perwakilan desa wisata terpilih (Letvuan, Wab, Ohoi dertawun, Soinrat, dan Tanimbar Kei) menunjukkan bahwa desa-desa memiliki potensi atraksi wisata yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pengembangan desa wisata. Masyarakat menyadari perlunya peningkatan kesadaran pengelola desa wisata mengenai peran penting sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Implikasi dari bimtek ini adalah desa wisata perlu menyusun kembali pengelolaan atraksi wisata dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi eksisting di lokasi dan membangun jejaring dan kerja sama dengan pelaku usaha wisata.

Kata kunci: bimbingan teknis; desa wisata; pariwisata; pembangunan desa; tata kelola

PENDAHULUAN

Kekayaan Indonesia dapat diidentifikasi dari budaya, sejarah, tradisi, dan alam di setiap daerahnya, baik kota maupun desa. Kekayaan Indonesia di daerah perdesaan memiliki keindahan dan keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik masyarakat global. Potensi desa yang unik di setiap daerah menjadi potensi daerah yang harus dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan potensi ini dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian alam dan kearifan lokal.

Sejak 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun. Pada 2022, pagu dana desa sebesar Rp68 triliun disediakan untuk 74.961 desa di sejumlah 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pembangunan bersumber dari dana desa tersebut semakin menegaskan komitmen Presiden bahwa pemanfaatan dana desa harus selaras dengan peningkatan kualitas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Panduan dan contoh praktik baik dalam pembangunan desa dapat digunakan desa-desa sebagai referensi untuk pemanfaatan dana desa yang lebih baik (Yuwono, 2022).

Salah satu pemanfaatan dana desa adalah mengembangkan desa wisata yang terintegrasi antara atraksi, aksesibilitas, dan amenities pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Peran penting dalam pengembangan pariwisata nasional dimiliki oleh desa wisata. Kemenparekraf mencanangkan pengembangan desa wisata hendaknya mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Desa wisata yang berhasil menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, antara lain Desa Pentingsari dan Desa Umbulharjo di Yogyakarta, Desa Pongok di Klaten, di Malang Desa Pujon Kidul, Desa Kete Kesu di Toraja, di Bali Desa Penglipuran, dan Kampung Blekok di Situbondo (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Bimbingan teknis (bimtek) Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Maluku Tenggara merupakan program kerja sama dengan Kemenparekraf yang dilakukan sebagai upaya menggerakkan sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat atau SDM pengelola destinasi pariwisata di Maluku Tenggara. Tujuan dilakukan kegiatan

ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat atau SDM pengelola destinasi pariwisata, khususnya masyarakat desa di kawasan penyangga Maluku Tenggara untuk mengelola dan mengembangkan potensi daya tarik wisata desa.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk menciptakan kolaborasi dan pendampingan lanjutan serta pengembangan desa wisata di kawasan Maluku Tenggara antara pengelola desa wisata, Dinas Pariwisata, serta Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Selain itu, kegiatan bimtek ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat atau SDM pengelola destinasi pariwisata dalam proses bisnis pariwisata di Maluku Tenggara. Di sisi lain, pemetaan potensi daya tarik wisata serta tantangan pengembangan destinasi Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, Desa Wisata Wab, Desa Wisata Tanimbar Kei, serta Desa Wisata Letvuan dapat dilakukan untuk proses pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi daya tarik desa tersebut.

Sejauh ini keseluruhan desa yang menjadi plot bimtek merupakan desa-desa yang dikenal sebagai desa-desa wisata dengan potensi pengembangan atraksi alam yang sangat baik. Hal ini disebabkan potensi-potensi alami pantai sangat potensial dikembangkan sebagai *marine tourism*. Namun, pengelola desa wisata menyadari bahwa kemampuan pengelolaan masyarakat desa masih terbatas, terutama dalam hal inovasi pengembangan atraksi dan pengelolaan desa wisata yang modern. Oleh sebab itu, bimtek ini merupakan terobosan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan atraksi dan pengelolaan desa wisata yang lebih baik.

Dari observasi yang dilakukan, terdapat tiga aspek penetapan desa wisata di Maluku Tenggara, yaitu aspek atraksi yang baik, aspek sarana dan prasarana sebagian besar desa masih kurang, aspek keterjangkauan yang diakui merupakan kendala terbesar. Dengan bimtek ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* tentang inovasi atraksi yang menjembatani berbagai kekurangan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PkM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap ke-1 adalah penentuan lokasi. Pada tahap ini kegiatan bimtek dilakukan di Kawasan Penyangga Maluku Tenggara, tepatnya di Balai Desa Ohoidertawun, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahap ini ditentukan desa-desa wisata yang menjadi target peningkatan kapasitas masyarakat. Kriteria penentuan desa wisata yang terpilih ditentukan oleh Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Pada tahap ini ditentukan lima desa sampel, yaitu Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Ohoidertawun, Desa Soinrat, dan Desa Tanimbar Kei.

Tahap ke-2 adalah pemilihan peserta. Pemilihan peserta kegiatan dikoordinasi dan dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata. Jumlah peserta sebanyak lima puluh orang, yang terdiri atas perwakilan Desa Wisata Letvuan, Desa Wisata Wab, Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, serta Desa Wisata Tanimbar Kei, dan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Semua peserta merupakan peserta terpilih yang ditentukan oleh Dinas. Peserta FGD adalah pengelola desa wisata yang diwakili oleh pengurus kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan atau bumdes pada masing-masing desa sebanyak sepuluh peserta.

Tahap ke-3 adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dibagi dalam dua metode pembelajaran untuk dua hari. Hari pertama dilakukan pembelajaran mengenai pengembangan dan pemetaan potensi dan jejaring desa wisata, konsep sadar wisata dan peranan kelompok sadar wisata (pokdarwis), hingga penerapan CHSE serta model pengelolaan *homestay*. Hari kedua dilakukan pembelajaran praktik. Dalam pembelajaran praktik, para peserta melakukan kerja kelompok yang didampingi para fasilitator dan hasil kerja kelompok tersebut dipaparkan di hadapan para peserta lain.

Kegiatan PkM dilaksanakan pada 16 dan 17 Maret 2023 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara. Bimtek terlaksana dengan interaksi aktif antara narasumber dan masyarakat melalui pemaparan dan diskusi serta pembelajaran praktik sebagai simulasi pengelolaan desa.

HASIL DAN DISKUSI

Hari pertama kegiatan dengan fokus pembelajaran teori difasilitasi oleh lima narasumber. Narasumber pertama, yaitu Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf, Bapak Harwan Ekoncahyo Wirasto, menyampaikan bimtek Pengembangan Desa Wisata di Desa Ohoidertawun. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah Kemenparekraf untuk memberikan peluang bagi desa wisata di Maluku Tenggara agar berkembang. Hal ini diperlukan karena hampir semua desa wisata di Maluku Tenggara masih tergolong desa wisata rintisan yang sedang dalam upaya berkembang dan maju.

Narasumber kedua, Bupati Maluku Tenggara, dalam kegiatan bimtek ini menyatakan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 76 destinasi pariwisata (alam, budaya, dan buatan) yang termasuk program *Wonderful Indonesia*. Salah satu destinasi wisata yang dapat dijadikan contoh dapat dilihat di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, dengan menjadi destinasi wisata, desa wisata dapat meningkatkan kesempatan kerja dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat desa dan sekitarnya. Beberapa program dan kegiatan sebagai upaya pengembangan destinasi unggulan, misalnya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pantai Famur Ngiar Barat dan Pengembangan Marina Kawasan Teluk Uf. Penghargaan-penghargaan yang telah diterima Desa Wisata Ngilngof menjadi salah satu motivasi bagi pemerintah Maluku Tenggara untuk lebih mengembangkan desa-desa di Maluku Tenggara menjadi desa wisata maju.

Diskusi serius terjadi dengan masyarakat tentang perlunya interaksi yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat tentang arti penting pariwisata. Masyarakat sangat menyadari perlunya menciptakan keberlanjutan dari wilayah mereka, tetapi interaksi hubungan dengan pemerintah kabupaten merupakan energi yang baik untuk terus bergerak. Masyarakat juga berharap penjelasan perencanaan pariwisata di Maluku Tenggara sesuai dengan arahan Bupati. Keterpaduan *pentahelix* pariwisata berjalan dengan baik apabila didorong oleh kebijakan bupati yang peduli terhadap pengembangan desa wisata. Bupati menyampaikan prioritas sektor pariwisata di Maluku Tenggara diharapkan akan mendorong berkembangnya desa wisata secara lebih baik.

Narasumber ketiga, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai salah satu narasumber memberikan arah dan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024--2026. Paparan yang diberikan kepada peserta bimtek, antara lain visi dan misi, gambaran umum dan capaian renstra tahun 2019--2023, tingkat kunjungan wisatawan serta rata-rata tinggal tahun 2020--2022, destinasi wisata baru yang dikembangkan tahun 2020--2022, jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat, kekuatan dan kelemahan pelayanan pemerintah daerah, potensi pariwisata dan arsitektur kinerja pembangunan sektor pariwisata beserta strateginya.



Gambar 1. Pembukaan Bimbingan Teknis

Dari kiri ke kanan : Bupati Maluku Tenggara (Drs. Mukamad Thaher Hanubun); Dosen Podomoro University (Dr. Santi Palupi); Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf (Bapak Harwan Ekoncahyo Wirasto); Kepala Dinas Pariwisata Kab. Maluku Tenggara (Sarah Far-Far); Pengelola DTW Pantai Ngurbloat (Ronald Tethool)

Gambar 1 menjelaskan suasana pembukaan bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata di Maluku Tenggara. Pemaparan visi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata menggarisbawahi dan menekankan desa wisata merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisata Maluku Tenggara. Hal ini didasari oleh perkembangan pembangunan ke depan tidak boleh menggantungkan pada sumber daya alam yang waktu *renewable*-nya sangat panjang. Pariwisata dan desa wisata adalah jawaban yang dirasakan paling sesuai untuk menjawab tantangan tersebut.

Puncak kegiatan ialah penjelasan narasumber Dr. Santi Palupi sebagai pembicara inti yang menjelaskan secara teori tentang pengertian desa wisata. Desa wisata merupakan wilayah desa yang memiliki keunikan khas dari komunitas masyarakatnya yang dapat menciptakan perpaduan beberapa daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan, termasuk kampung wisata karena keberadaannya di daerah kota (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021).

Terdapat tujuh komponen penyusun desa wisata secara umum, yaitu potensi daya tarik wisata (budaya, alam, dan karya kreatif buatan) sebagai unsur penarik kunjungan wisatawan; batasan geografis /administratif yang jelas; komitmen masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata; fasilitas pendukung wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata; sumber daya manusia yang berkualitas; sarana prasarana lingkungan; organisasi pengelolaan desa wisata (Kementerian Pariwisata, 2016).

Pengembangan dan Pemetaan Potensi Desa Wisata

Menurut Tarunajaya (2020), desa wisata memiliki empat tingkat perkembangan.

- 1) Rintisan, dengan kriteria sebagai berikut: a) masih merupakan potensi yang dapat dikembangkan; b) terbatasnya sarana prasarana wisata; c) wisatawan yang berkunjung belum ada/masih sedikit sekali atau baru dari masyarakat sekitar; d) belum ada kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang ada; e) perlu pendampingan dari pihak pemerintah/swasta); f) pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa wisata; g) sifat pengelolaan desa wisata lokal.
- 2) Berkembang, dengan kriteria sebagai berikut: a) mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan dari luar daerah; b) terdapat pengembangan fasilitas pariwisata serta sarana prasarana; c) mulai tercipta aktivitas ekonomi di masyarakat dan lapangan pekerjaan.
- 3) Maju, dengan kriteria sebagai berikut: a) masyarakat sudah sadar sepenuhnya terhadap potensi wisata dan pengembangannya; b) menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara; c) fasilitas pariwisata serta sarana prasarana sudah memadai; d) masyarakat sudah mampu untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal; e) masyarakat sudah mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; f) sistem pengelolaan desa wisata berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- 4) Mandiri, dengan kriteria sebagai berikut: a) masyarakat sudah memberikan inovasi; b) mengembangkan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri; c) sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia; d) sarana dan prasarana mengikuti standar internasional minimal ASEAN; e) mengelola desa wisata secara kolaboratif antarsektor dan *pentahelix* berjalan baik; f) dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata; g) sudah memanfaatkan digitalisasi sebagai alat promosi dan penjualan mandiri.

Penilaian Tingkatan Desa Wisata

Mengacu pada ASEAN CBT, untuk penilaian pada tingkat mana perkembangan suatu desa wisata, ditentukan delapan kriteria, yaitu 1) masyarakat sebagai pemilik dan pengurus, 2) memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, 3) berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, 4) terdapat partisipasi aktif antara masyarakat lokal dan pengunjung/wisatawan, 5) terdapat jasa perjalanan wisata dan pemandu wisata/pramuwisata yang berkualitas, 6) terdapat kualitas makanan dan minuman, 7) terdapat akomodasi/*homestay* yang berkualitas, dan 8) kinerja *friendly tour operator/fto* (The Asean Secretariat, 2016).

Jejaring Desa Wisata

Konsep jejaring desa wisata mencakup percepatan pencapaian target jejaring desa wisata yang disebut *pentahelix model*. Model tersebut terdiri atas *academic/conceptor* (standardisasi dan sertifikasi), *business/enabler* (peningkatan kesehatan dan kebersihan, peningkatan ICT infrastruktur, dan era digital), *community/accelerator* (akselerasi gaya hidup digital, *traveller*, fotografi, dan *blogger*) dan *government/regulator* (infrastruktur pariwisata, insentif investor, *free visa*) (Vani et al., 2020).

Konsep Sadar Wisata Peranan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Konsep sadar wisata dan peranan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di destinasi wisata juga menjadi materi yang diberikan kepada para peserta bimtek.

Gambar 2 menggambarkan secara jelas kerangka keterkaitan antara konsep sadar wisata dan pengembangan pariwisata (Bahri *et al.*, 2021). Konsep sadar wisata memerlukan peran masyarakat agar tercipta lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendorong tumbuh kembangnya pariwisata suatu desa wisata. Dukungan dan peran masyarakat yang dimaksud berasal dari pokdarwis atau kelompok sadar wisata pada masing-masing desa. Penggunaan konsep sadar wisata untuk mengembangkan pariwisata di daerah dapat dijabarkan dalam tujuh unsur Sapta Pesona. Perwujudan Sapta Pesona akan meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi.



Gambar 2. Kerangka Hubungan antara sadar wisata dan pengembangan pariwisata (Sumber: Kemenpar 2021)

Penerapan CHSE

Penerapan CHSE (*cleanliness, healthy, safety, environment*) dengan penjelasan, yaitu kebersihan (*cleanliness*) adalah terbebas dari kotoran, bakteri, virus, serta bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kesehatan (*healthy*) adalah pelayanan yang menerapkan peraturan, perawatan, pencegahan, pemantauan, serta pengendalian. Keselamatan (*safety*) adalah keadaan bebas dari risiko, bahaya/pencemaran/ gangguan. Lingkungan (*environment*) adalah sumber daya yang tersedia di suatu kawasan yang memengaruhi manusia dan makhluk hidup sekitarnya (Sintaman *et al.*, 2022).

Beberapa protokol kesehatan pandemi covid-19 yang perlu diadaptasi baik oleh wisatawan maupun pengelola desa wisata, di antaranya menggunakan masker/ menutup mulut, memeriksakan suhu tubuh, dan menjaga jarak saat bersosialisasi. Pada masa depan bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi salah satu kebiasaan baru, yang pada akhirnya mengubah kebiasaan lama, misalnya tidak lagi bersalaman saat bertemu, tetapi melempar senyum, mengangguk, dan salam tangan di dada (Tarunajaya *et al.*, 2021).

Pengelolaan Homestay

Homestay adalah rumah yang ditinggali, dengan sebagian kamar disewakan kepada tamu dalam kurun waktu tertentu, yang bertujuan mempelajari budaya setempat atau kegiatan rutin tertentu. Dalam pengelolaan desa wisata, keberadaan *homestay* merupakan salah satu sarana pendukung penting serta dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata (Widyaningsih, 2020).

Terdapat sembilan kriteria standar *homestay*: 1) tuan rumah atau penyedia *homestay*, 2) fasilitas akomodasi (rumah, kamar tidur, kamar mandi, toilet), 3) aktivitas (kegiatan budaya masyarakat lokal, kegiatan yang dapat dilakukan di alam, yang menunjukkan identitas asli destinasi), 4) manajemen/tata kelola, 5) lokasi/aksesibilitas, 6) tingkat higienitas dan kebersihan, 7) keselamatan dan keamanan, 8) pemasaran dan promosi, serta 9) prinsip berkelanjutan (Tarunajaya *et al.*, 2020).

Narasumber kelima, yaitu Ronald Tethool, pengelola Wisata Pantai Ngurbloat dengan pasir terhalus, berbagi pengalaman dalam menggali potensi dan bersama masyarakat mengelola Desa Wisata Ngilngof yang terletak di Kecamatan Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara hingga berhasil meraih juara pertama kategori desa wisata maju terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) oleh Kemenparekraf.

Acara di hari pertama dilanjutkan dengan diskusi dan memberi masukan beberapa hal tentang perkembangan kondisi desa masing-masing serta membagi kelompok sesuai dengan perwakilan desa, yaitu Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Dertawun, Desa Soinrat, dan Desa Tanimbar Kei, yang terdiri atas sepuluh orang per desa. Setiap kelompok diberikan tugas mengisi *form* daftar identifikasi potensi dan tantangan pengembangan desa wisata.

Pada hari kedua, dilanjutkan dengan praktik, yang dipandu oleh narasumber utama Dr. Santi Palupi. Setiap kelompok diberi waktu untuk melanjutkan diskusi dan menyusun rencana aksi pengelolaan desa wisata untuk jangka pendek, menengah, dan panjang melalui kertas kerja. Pada kesempatan itu, diberikan pengarahan kepada setiap kelompok desa wisata dengan menggunakan *checklist* pengembangan desa wisata. Tujuannya untuk membantu para peserta dalam mengidentifikasi desa wisata yang dikelolanya. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator kelompok yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu dan memandu kelompok peserta saat mengisi *checklist* dan menuangkannya ke dalam rencana pengembangan.

Rencana aksi yang dibuat ke dalam kertas kerja oleh masing-masing kelompok desa wisata, yang didampingi fasilitator, dipresentasikan kepada para narasumber. Selanjutnya, para narasumber memberikan tanggapan terhadap rencana aksi yang telah disusun guna menyempurnakan rencana aksi tersebut. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian *goodie-bag* berupa kaos, topi, *block note*, dan produk UMKM masyarakat setempat dari Kemenparekraf sebagai salah satu bentuk dukungan. Hal ini merupakan upaya Kemenparekraf dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.



Gambar 3. Suasana diskusi, presentasi kelompok, dan pemberian penghargaan dari Kemenparekraf

Gambar 3 menjelaskan suasana pembelajaran praktik yang dilakukan masyarakat untuk membuka wawasan baru pengembangan desa berdasarkan pengetahuan dan wawasan baru yang disampaikan, pengalaman pengelolaan yang sudah dilakukan, serta panduan implementasi oleh narasumber. Dengan pelaksanaan praktik tersebut, diperoleh model baru rencana pengembangan desa wisata ke depan yang disusun ulang secara garis besar. Diperlukan konsistensi peserta untuk dapat menyosialisasikan termuan dan hasil bimtek ini kepada pengurus lain dan masyarakat desa atas reka ulang tersebut. Sertifikat bimtek di samping menunjukkan bahwa peserta telah mengikuti program secara tuntas juga merupakan komitmen implementasi arah baru pengembangan dan pengelolaan desa wisata ke depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Main attraction/unique selling point (USP) setiap desa wisata perlu dipertajam agar dapat disusun pola perjalanan wisata tematik yang terintegrasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, perlu partisipasi dan penguatan jejaring masyarakat desa-desa di kawasan penyangga Maluku Tenggara untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi kesenjangan pengembangan pariwisata. *Stakeholders* yang potensial dan *existing*, seperti Atourin, Telkomsel, atau program KKN kampus dapat dimanfaatkan untuk menunjang penurunan tingkat kesenjangan tersebut.

Implikasi bimtek ini adalah perlunya menyusun kembali pengelolaan atraksi wisata dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi eksisting di lokasi dan membangun jejaring dan kerja sama dengan pelaku usaha wisata (bagian dari *petahelix* pariwisata).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harwan Ekoncahyo Wirasto (Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf), Bapak Muhamad Thaher Hanubun (Bupati Maluku Tenggara), Ibu Sarah Far Far (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara), dan Ronald Tethool (Pengelola DTW Pantai Ngurbloat) yang telah berperan aktif dalam kegiatan bimtek ini sebagai narasumber dengan memberikan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Bersyukur juga atas keterlibatan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, dan masyarakat perwakilan Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, Desa Wisata Letvuan, Desa Wisata Wab, dan Desa Wisata Tanambat Kei.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, A. S., Rianto, Abdillah, F., & Arianti, S. P. (2021). *Pariwisata dan desa wisata: Teori dan praktik*. Qiara Media.
- Kementerian Pariwisata. (2016). *Panduan Pengelolaan homestay di destinasi pariwisata*. Kementerian Pariwisata.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). 7 Desa Wisata yang mengusung konsep sustainable tourism. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-desa-wisata-yang-mengusung-konsep-sustainable-tourism>
- Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Sintaman, P. I., Sari, M., & Fitriani. (2022). Implementasi CHSE (cleanliness, healthy, safety, environment) bagi industri pariwisata di Kota Palangkarya. *Jurnal Darma*

- Agung*, 30(3), 1006–1007.
- Tarunajaya, W. B., Arianti, Santi P., Simanjuntak, D., Setiawan, B., & Afriza, L. (2020). *Gerakan sadar wisata. Modul 1*. Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Tarunajaya, W. B., Simanjuntak, D., Setiawan, B., Afriza, L., & Arianti, Santi.P. (2021). *Buku panduan pemberdayaan masyarakat desa wisata berbasis pendampingan*. Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- The ASEAN Secretariat. (2016). Asean community based tourism standard. In *Asean*. www.asean.org
- Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adiinto, A. (2020). Model pentahelix dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Pekanbaru. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 63–70. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361>
- Widyaningsih, H. (2020). Pengembangan pengelolaan *homestay* dalam mendukung Desa Wisata Diro. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 11(1), 9–15.
- Yuwono, T. P. (2022). Membedah potensi dan tantangan dana desa tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2021>